



# LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
KONAWE SELATAN**



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGGARAN II  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN  
TAHUN 2020**

**LAPORAN AKSI PERUBAHAN  
PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONawe SELATAN**



**Nama : Hendras Budi Paningkat, S. ST**  
**NIP : 19810811 200212 1 005**  
**No. Absen : 20**  
**Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan**  
**Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**


**PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**Disahkan di  
Kendari – Bogor , 2020  
(distance learning)**

**Coach**

**Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.  
NIP. 19750225 199403 1 001**

**Project Leader**



**Hendras Budi Paningkat, S.ST.  
NIP. 19810811 200212 1 005**

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR  
PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN**

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

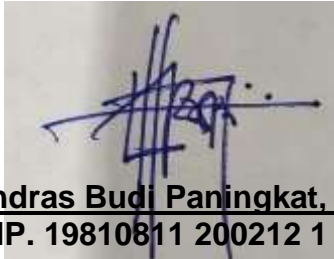
Nama : Hendras Budi Paningkat, S.ST.  
NIP : 19810811 200212 1 005  
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan  
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)  
Angkatan : II  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan  
Judul Laporan Aksi Perubahan : Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang.

**Coach**

**Nandang Isnandar, S.SiT., M.T.**  
**NIP. 19750225 199403 1 001**

**Project Leader**

  
**Hendras Budi Paningkat, S.ST.**  
**NIP. 19810811 200212 1 005**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa penulis panjatkan selama masa Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II hingga saat ini telah menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi Perubahan dengan judul Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani.

Adapun pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan yang kami laksanakan saat ini terkendala dengan keterbatasan ditengah masa pandemic Covid - 19 sehingga harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan namun penulis tetap berharap mampu secara maksimal melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan secara maksimal dalam rangka mendukung kegiatan layanan pertanahan derivatif lainnya.

Besar Harapan kami dengan laporan ini, kepedulian terhadap tercapainya data pertanahan yang berkualitas yaitu terpenuhinya data bidang tanah terdaftar yang sudah ter-entry dalam database KKP secara benar, terpetakan / terplott secara benar dan valid semakin besar dan menjadi skala prioritas pada satuan kerja masing-masing. Peningkatan kualitas data pertanahan merupakan syarat mutlak yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN dalam rangkan menuju era transformasi digital.

Laporan Pelaksanaan Aksi Perubahan ini merupakan output dalam mengikuti Pelatihan Kepimimpinan Pengawas (PKP) Tingkat IV, sehingga penulis berharap masukan, saran dan kritik untuk melengkapi kekurangan dan kendala-kendala yang kami hadapi selama melaksanakan kegiatan aksi perubahan ini.

Terimakasih penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung kegiatan aksi perubahan ini yaitu :

1. Kapala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Deni Santo, S.T., M.Sc. yang telah memberi kesempatan kami untuk menimba ilmu.

2. Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, bapak LM Ruslan Emba, S.H., M.Si selaku mentor.
3. Seluruh Widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan para pengajar dalam Diklat PKP Angkatan II, serta Bapak Nandang Isnandar, S.SiT., M.T. selaku pembimbing/coach.
4. Stake holder terkait, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe selatan, dan Provinsi Sulawesi tenggara, Pemerintah Desa Lamong Jaya dan Lapoa di Kabupaten Konawe Selatan.
5. Tim efektif pelaksanaan aksi perubahan yang telah membantu, mendukung dan bekerja keras, ikhlas dan semangat untuk melaksanakan aksi perubahan ini.

Penulis juga berharap semoga hasil pelaksanaan aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dalam perspektif pertanahan.

Andoolo, 18 Agustus 2020

Pserta Diklat PKP Angkatan II

TTD

Hendras Budi Paningkat, S.ST.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA SEMINAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Area dan Fokus</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Aksi Perubahan</b> .....	<b>3</b>
<b>D. Manfaat Aksi Perubahan</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Adopsi dan Adaptasi Hasil Stula</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB II PROFIL KINERJA LAYANAN</b> .....	<b>7</b>
<b>A. Tuga Pokok dan Fungsi Organisasi</b> .....	<b>7</b>
<b>B. Sumber Daya</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II ANALISIS MASALAH</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>B. Penetapan dan Pemilihan Masalah</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Analisi Kelayakan Inovasi</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Terobosan Inovasi</b> .....	<b>23</b>
<b>B. Pentahapan dan Anggaran (Milestone)</b> .....	<b>25</b>
<b>C. Identifikasi Stakeholder</b> .....	<b>26</b>
<b>D. Hasil dan Manfaat Aksi Perubahan</b> .....	<b>29</b>
<b>E. Pemanfaatan Sumber Daya</b> .....	<b>30</b>
<b>F. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan</b> .....	<b>32</b>
<b>G. Standar Operasi Prosedur Layanan Publik</b> .....	<b>33</b>

<b>BAB V PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....</b>	<b>34</b>
1. Membangun Integritas .....	34
2. Pengelolaan Budaya Layanan .....	35
3. Pengelolaan Tim .....	36
<b>B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan .....</b>	<b>38</b>
1. Capaian Tahapan Inovasi .....	39
2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan .....	44
3. Manfaat Aksi Perubahan .....	47
<b>C. Keberlanjutan Aksi Perubahan .....</b>	<b>49</b>
1. Legalitas Penerapan Inovasi .....	50
2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi .....	50
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>A. Saran .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>54</b>

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel.1, Ketersediaan data base bidang tanah terdaftar BPN Konsel

Tabel.2, Ketersediaan sumber daya BPN Konsel

Tabel.3, Memilih Isu Strategis/Masalah Menjadi Gagasan Perubahan dengan Kriteria

ASTRID

Tabel 4, Tabel hasil diksusi/brainstorming pencarian akar masalah

Tabel 5, pentahapan kegiatan dan anggaran (milestone)

Tabel 6, keanggotaan dan uraian tugas tim efektif

Tabel 7, Kendala dan alternatif solusi yang ditemui dalam aksi perubahan

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1, Memilih beberapa isu strategis untuk aksi perubahan
- Gambar 2, Kriteria memilih isu strategis melalui metode ASTRID
- Gambar 3, Diagram tulang ikan (Fishbone Diagram)
- Gambar 4, Model Kanvas Inovasi
- Gambar 5, pemetaan stakeholders
- Gambar 6, struktur tim kerja aksi perubahan
- Gambar 7, Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan dan stakeholder internal lainnya
- Gambarl 8, SK tim Efektif
- Gambarl 9, Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Entry BT, GS/SU
- Gambarl 10, Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi PDP dan PP
- Gambarl 11, Pengolahan data hasil scan dan rectifikasi s/d output peta pendaftaran online
- Gambarl 12, Sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait
- Gambarl 13, Kegiatan lapang peningkatan kualitas data pertanahan
- Gambarl 14, Kualitas data desa lamong jaya sebelum peningkatan kualitas data
- Gambarl 15, Kualitas data desa lamong jaya setelah peningkatan kualitas data
- Gambarl 16, Peningkatan kualitas data pada lokasi PTSL
- Gambarl 17, Kondisi Peta Pendaftaran yg rusak, melayang dkk
- Gambarl 18, Sosialisasi & Edukasi aplikasi pendukung layanan peningkatan kualitas data
- Gambarl 19, kondisi pemetaan partisipatif melalui aplikasi sentuh tanahku

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu isu penting yang berkembang selama beberapa dasa warsa pada awal perkembangan era industri 4.0, dimana ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan manusia. Sementara itu seiring dengan lajunya gerak pembangunan, organisasi-organisasi publik maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas, dan efisiensi mereka. Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien.

Pelayanan publik saat ini merupakan isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia dimana kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang semakin ketat. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah (Sinambela, 2010:42).

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan.

Pelayanan publik di Indonesia masih memberikan kesan buruk, dimana selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan di Indonesia. Menurut Dwiyanto pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Dalam ranah ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan oleh warga dan

masyarakat luas (Dwiyanto, 2008:21). Hal itu dapat ditunjukkan dengan kekecewaan masyarakat melalui pengaduan atau laporan menyangkut pelayanan publik kepada instansi terkait maupun lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia.

Dalam konteks pertanahan, layanan publik dalam bidang pertanahan merupakan tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam tataran aplikasi dilapangan, satuan kerja yang langsung berhubungan langsung dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Layanan publik dalam bidang pertanahan dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki tugas melakukan layanan publik kepada masyarakat dalam bidang pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Secara spesifik, jenis layanan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 122 jenis layanan sebagaimana tercantum dalam jenis layanan pertanahan yang terdapat dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) sebagai sarana yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan termasuk sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas informasi pertanahan, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space/storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless).

Namun dalam Aplikasi dilapangan, kinerja layanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, belum sepenuhnya memberikan kinerja layanan yang optimal kepada msayarkat. Bahkan akhir akhir ini, isu tentang rendahnya / kurang baiknya pelayanan sertifikasi tanah sering muncul di lingkungan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengungkapkan kinerja layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang tidak profesional, lambat dan terkesan berbelit-belit.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja layanan pertanahan adalah ketersediaan data base pertanahan yang berisikan informasi data pertanahan terhadap bidang-bidang tanah yang telah terdaftar (bersertipikat) belum sepenuhnya ter-entry secara digital dan belum terpetakan secara benar dalam aplikasi KKP. Ketersediaan data base pertanahan yang lengkap (komprehensif) serta memiliki level kualitas data yang baik dan valid merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi untuk melakukan layanan pertanahan secara originer maupun derivatif baik sebagai data dukung maupun sistem kontrol pelaksanaan layanan.

Ketersediaan kualitas data base pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan saat ini masih sangat rendah dan belum valid, sehingga berpengaruh signifikan terhadap lambatnya layanan pertanahan dan rentan permasalahan tumpang tindih sertipikat. Dengan fenomena empiris yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, sebagai peserta pendidikan dan pelatihan pejabat pengawas angkatan II, penulis tertarik melaksanakan aksi perubahan dengan judul **“Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan “**.

## **B. Area dan Fokus**

Area dalam pelaksanaan aksi perubahan ini dilaksanakan pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Area pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan di dalam ruangan (studio) dan di luar ruangan (lapangan).

Fokus pelaksanaan aksi perubahan ini adalah melakukan peningkatan kualitas data pertanahan yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu :

- 1) Input data (entry data) Buku Tanah, Gambar Situasi/Surat Ukur,
- 2) Identifikasi peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran analog dan digital
- 3) Pemetaan bidang tanah melalui olah data maupun turun lapangan

## **C. Tujuan Aksi Perubahan**

Tujuan aksi perubahan adalah secara umum adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai etika, integritas kepemimpinan pancasila, bela negara dan kepemimpinan serta aktualisasi dari unsur-unsur manajemen organisasi secara menyeluruh sehingga dapat memberikan peningkatan

kinerja layanan pertanahan kepada pengguna jasa layanan. Sedangkan tujuan khusus aksi perubahan adalah :

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Peran Pancasila dan semangat bela negara dan melaksanakan peran kepemimpinan yang beretika dan berintegritas dengan melaksanakan tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja layanan pertanahan aksi perubahan peningkatan kualitas data pertanahan.
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif mampu memetakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Budaya kepemimpinan yang melayani serta pembentukan tim peningkatan kualitas data yang efektif, solid dan adaptable serta melakukan optimalisasi dan pengembangan sumber daya organisasi melalui manajemen yang tepat untuk mencapai tujuan aksi perubahan yaitu tercapainya peningkatan kualitas data pertanahan secara massif.
3. Merancang inovasi untuk meningkatkan kerja pelayanan publik terutama dalam memanfaatkan teknologi digital. Salah satu inovasi dalam aksi perubahan ini adalah memanfaatkan teknologi digital berupa aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan dan mempercepat bisnis proses peningkatan kualitas data pertanahan.
4. mengendalikan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pelayanan publik yang berkualitas

#### **D. Manfaat Aksi Perubahan**

Manfaat pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam Aksi Perubahan ini antarlain sebagai berikut :

1. Bagi Team Leader
  - a) Dapat menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) dengan melaksanakan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas data pertanahan,

dimana kualitas data pertanahan yang baik dan valid merupakan syarat mutlak dalam rangka menuju era transformasi digital.

- b) Team leader dapat mengaktualisasikan teori pembelajaran dalam Diklat PKP melalui aksi perubahan dengan melakukan analisa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, teknik komunikasi, perencanaan kegiatan pelayanan, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), melakukan manajemen mutu dan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pekerjaan.

## 2. Bagi Unit Kerja dan Instansi

Peningkatan kualitas data pertanahan merupakan skala prioritas unit kerja Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dan instansi/Lembaga Kementrian ATR/BPN yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga dengan tercapainya peningkatan kualitas data pertanahan yang baik dan valid, maka data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi, dasar pengambilan kebijakan dan sistem kontrol dalam pelayanan pekerjaan.

## 3. Bagi Masyarakat / Pengguna Jasa Layanan

Dengan tersedianya data base pertanahan yang berkualitas dan valid, dapat memberikan manfaat yang jelas dan informatif kepada masyarakat maupun pengguna jasa pertanahan lainnya (user), termasuk dalam hal investasi sehingga informasi pertanahan menjadi semakin mudah, cepat diperoleh melalui aplikasi-aplikasi pertanahan yang tersedia. (sentuh tanahku, website Kementrian ATR/BPN dll).

## 4. Bagi Lembaga Pelatihan

- a) Memberikan informasi model inovasi yang dilaksanakan oleh peserta Diklat PKP Angkatan II mengenai peningkatan pelayanan publik dalam bidang pertanahan pada satuan kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsinya;
- b) Memberikan informasi apakah metode dan materi pembelajaran dalam Diklat PKP Angkatan II dapat diserap dengan baik oleh peserta diklat melalui aksi perubahan yang dilaksanakan.

- c) Lembaga pelatihan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif setelah melaksanakan pendidikan dan latihan sehingga mampu menjadi pemimpin yang berkualitas;

## **E. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan**

Sebelum membuat pelaksanaan aksi perubahan, peserta Diklat PKP Angkatan 2 melakukan kegiatan studi lapangan pada salah satu organisasi/lembaga yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Adapun locus dari studi lapangan yang dilaksanakan oleh penulis adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Pemilihan DPMPTSP DKI Jakarta menjadi locus studi lapangan karena lembaga tersebut merupakan lembaga pelayanan publik yang memiliki kinerja layanan publik yang sangat baik dengan berbagai inovasi dan manajemen organisasi serta telah meraih prestasi dan penghargaan dalam memberikan layanan publik.

Dari hasil studi lapangan, diharapkan dapat diambil pembelajaran dari keunggulan locus yaitu DPMPTSP DKI Jakarta (best practice) yaitu :

- 1) Peran Kepimpinan
- 2) Inovasi Pelayanan
- 3) Kompetensi dan pemberdayaan SDM
- 4) Pembangunan Jejaring Kerja dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan
- 5) Penerapan Manajemen Kinerja
- 6) Penerapan Manajemen Resiko
- 7) Planning & Budgeting
- 8) Pemanfaatan Teknologi



## **BAB II**

### **PROFIL KINERJA PELAYANAN**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

##### **1. Tugas dan Fungsi Instansi**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan publik dalam bidang pertanahan. Dalam tataran aplikasi dilapangan, satuan kerja yang langsung berhubungan langsung dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan

- f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

## **2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian

Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pelaksanaan tugas pelayanan pertanahan di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, tugas tersebut dijabarkan kepada Sub Bagian dan masing-masing Seksi serta sub seksi. Salah Satu seksi yang mempunyai tugas tersebut adalah Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan. Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai tugas Melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, survei dan pemetaan tematik, serta supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada seksi infrastruktur pertanahan;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN);
- f. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data spasial;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);
- h. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun;
- j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;

- k. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;
- m. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;
- n. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;
- o. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik; dan
- p. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi infrastruktur pertanahan.

### **3. Area Bermasalah**

Untuk menentukan area permasalahan dalam suatu organisasi, perlu dilaksanakan analisa dan penilaian kinerja suatu organisasi. Analisa dan penilaian kinerja organisasi menjadi tugas penting bagi para pemimpin organisasi tersebut.

Analisa dan penilaian kinerja secara periodik memungkinkan pemimpin organisasi dapat mengetahui posisi organisasi saat ini dibandingkan dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan dan telah memenuhi kriteria kepuasan pelanggan atau belum. Analisa dan penilaian kinerja dapat dilihat dengan cara melihat kinerja organisasi saat ini dengan penentuan kinerja organisasi yang diharapkan (normatif).

#### **a) Kinerja organisasi sekarang**

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan pelayanan pertanahan baik layanan permohonan pertama kali (originer) dan layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (derivatif) kepada masyarakat masih terkendala dengan ketersediaan data base pertanahan yang belum memiliki kualitas data yang baik, dan valid. Dengan data base pertanahan yang memiliki kualitas data yang rendah dan tidak valid (belum terpetakan secara benar), akan memberikan implikasi terhadap bisnis proses layanan pertanahan berikutnya, dan

menimbulkan potensi permasalahan pertanahan misalnya terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, lahirnya sertipikat ganda, lahirnya penerbitan sertipikat baru yang tidak sesuai prosedur administrasi yang benar. Rendahnya kualitas data pertanahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seluruh kegiatan layanan pertanahan termasuk program strategis nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga menghambat tercapainya desa lengkap, kecamatan lengkap dan kabupaten/kota lengkap.

No	Data	Jumlah	Prosentase
1	Bidang Tanah terdaftar	152.512	100,00%
2	Bidang Tanah terdaftar terpetakan	65.511	42,95%
3	Bidang Tanah terdaftar belum terpetakan	87.001	57,05%
4	Kecamatan	25	100,00%
5	Desa/Kelurahan	375	100,00%
6	Luas Wilayah	4.183.555.684	100,00%
Sumber data : KKP tanggal 11 Mei 2020			

Tabel.1, Ketersediaan data base bidang tanah terdaftar BPN Konsel

**b) Kinerja organisasi yang diharapkan**

Dengan fenomena empiris yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, urgensi dari kualitas data base pertanahan yang begitu besar, sehingga diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dapat melaksanakan percepatan peningkatan kualitas data pertanahan secara masif dan konsisten dengan melakukan inovasi-inovasi tertentu yang dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kualitas data pertanahan.

## B. Sumber Daya

Jumlah sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sebanyak 72 orang baik dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) serta Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi. Dengan jumlah sumber daya yang ada, dengan volume pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, diperkirakan sudah cukup memadai untuk melakukan layanan pertanahan secara profesional. Namun kondisi lapang, ketersediaan sumber daya manusia tersebut belum mampu memenuhi tuntutan layanan dalam era revolusi industri 4.0 karena kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah, infrastruktur pendukung yang minim dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam bidang tertib administrasi pertanahan.

No.	Status Pegawai	Jumlah
1	ASN	31
2	PPNPM	35
3	ASKB	6
	Jumlah	72

sumber : Subbag Tata Usaha

No.	Ketersediaan Alat	Status
1	Komputer/ Laptop	tersedia
2	Alat Ukur (GNSS RTK, GPS Handheld, TS)	tersedia
3	Scanner A0	tidak tersedia
	Jumlah	

sumber : Seksi Infrastruktur Pertanahan

Tabel.2, Ketersediaan sumber daya BPN Konsel

## **BAB III**

### **ANALISI MASALAH**

#### **A. Identifikasi Masalah**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara simultan melakukan penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Gajah Mada. Hal ini dilakukan beriringan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik tahun 2020-2024 yang sedang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penyusunan renstra ini memerlukan pemikiran visioner, perhatian yang besar, serta didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan demi perencanaan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional yang menyeluruh, setiap lembaga pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen strategis. Penerapan manajemen strategis dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Penyusunan renstra ini juga diharapkan dapat mengatasi isu-isu strategis pertanahan dalam rangka mewujudkan Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yang Maju dan Modern. Adapun isu-isu strategis pertanahan tersebut antara lain :

1. Melaksanakan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang ada di NKRI. Kegiatan pendaftaran tanah dan pemberian kepastian hukum terhadap tanah merupakan bentuk pengelolaan administrasi pertanahan yang baik dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan menekan potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
2. Mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Saat ini ketersediaan RDTR sebagai acuan pola penataan ruang belum sepenuhnya terdapat pada setiap kabupaten/kota.
3. Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi berstandar dunia. Dalam era revolusi industri 4.0 tuntutan penggabungan/kolaborasi

antara teknologi digital dengan teknologi internet semakin besar, sehingga kompetensi SDM sebagai unsur pelaksana harus ditingkatkan kompetensinya untuk dapat memenuhi tuntutan perkembangan teknologi tersebut.

4. Kementrian ATR/BPN Menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi.
5. Kementrian ATR/BPN dapat mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik.
6. Meningkatkan PNBPN 10x dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara.
7. Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan.

Dari beberapa isu strategis pertanahan yang terdapat pada Kementrian ATR/BPN yang bersifat lebih luas dan bersifat nasional, maka dalam tataran aplikasi dilapangan khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi ditemukan beberapa isu strategis layanan pertanahan antara lain :

1. Pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan belum optimal dan terkesan lambat dengan indikator banyaknya tunggakan pekerjaan rutin.
2. Ketersediaan data base pertanahan yang belum berkualitas, yaitu terdapatnya data base bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada peta pendaftaran dalam Aplikasi KKP (KW1 dan KW2), sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan proses layanan pertanahan.
3. Digitalisasi dokumen pertanahan belum dilaksanakan secara masiif pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.
4. Tujuan utama PTSL untuk mewujudkan desa lengkap, kecamatan lengkap, kabupaten/kota lengkap sangat sulit diwujudkan.



Gambar 1, Memilih beberapa isu strategis untuk aksi perubahan



## B. Penetapan dan Pemilihan Masalah

Dari beberapa isu layanan pertanahan yang ada dan berkembang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dilakukan analisis permasalahan isu-isu tersebut untuk dapat mengetahui penyebab permasalahan pada isu-isu tersebut. Adapun teknik analisis dalam memilih isu-isu tersebut dapat menggunakan teknik **AKPL** yaitu Aktual, Kekhalayakan, Problematik dan Layak, atau menggunakan metode **ASTRID** yaitu Aktual, Spesifik, Transformasi, Relevan, Inovatif dan Dapat dilaksanakan selama pelatihan atau menggunakan **USG** yaitu urgensi, seriousness, dan growth.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, teknik analisis isu-isu strategis yang dilaksanakan oleh penulis yaitu dengan metode ASTRID.



Gambar 2, Kriteria memilih isu strategis melalui metode ASTRID

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Isu Strategis				Ket.
			A	B	C	D	
1	Aktual	15	15	15	10	15	
2	Spesifik	10	10	15	10	10	
3	Transformasi	10	7	10	8	10	
4	Relevan	15	14	15	15	15	
5	Inovatif	20	14	15	17	15	
6	Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan	30	20	25	25	25	
	Jumlah	100	80	95	85	90	

Tabel.3, Memilih Isu Strategis/Masalah Menjadi Gagasan Perubahan dengan Kriteria ASTRID

Dari hasil pembobotan isu-isu strategis yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan melalui metode ASTRID dapat diketahui bahwa Isu yang terpilih adalah isu B dengan total nilai 95.

Sekalipun isu A, C dan D juga merupakan isu strategis dan mungkin dapat meningkat kinerja dan citra yang baik bagi unit organisasinya, namun untuk dapat dilaksanakan utamanya pada masa Diklat PKP utamanya pada tahap jangka pendek, sulit dilaksanakan. Sedangkan isu D juga dapat dilaksanakan dalam tahap yang pendek, namun isu tersebut bukan merupakan tugas, pokok dan fungsi penulis sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

Setelah isu strategis untuk pelaksanaan aksi perubahan terpilih, yaitu isu tentang percepatan peningkatan kualitas data pertanahan, maka dapat dilakukan penentuan penyebab utama masalah/akar masalah dari isu strategis tersebut. Untuk mengetahui penyebab utama /akar masalah pada kualitas data pertanahan yang tidak memiliki kualitas data yang baik dan valid, penulis menggunakan analisa Diagram Tualng Ikan (Fishbone Diagram).



Gambar 3, Diagram tulang ikan (Fishbone Diagram)

Dikatakan Diagram Fishbone (Tulang Ikan) karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan, dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala. Sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram Cause and Effect (Sebab dan Akibat) karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu.

Diagram Fishbone dari Dr. Kaoru Ishikawa menjadi satu tool yang sangat populer dan dipakai di seluruh penjuru dunia dalam mengidentifikasi faktor penyebab problem/masalah. Alasannya sederhana. Fishbone diagram tergolong praktis, dan memandu setiap tim untuk terus berpikir menemukan penyebab utama suatu permasalahan.

Diagram Fishbone telah menciptakan ide cemerlang yang dapat membantu dan memampukan setiap orang atau organisasi/perusahaan dalam menyelesaikan masalah dengan tuntas sampai ke akhirnya. Kebiasaan untuk mengumpulkan beberapa orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian memadai menyangkut problem yang dihadapi oleh perusahaan Semua anggota tim memberikan pandangan dan pendapat dalam mengidentifikasi semua pertimbangan mengapa masalah tersebut terjadi. Kebersamaan sangat

diperlukan di sini, juga kebebasan memberikan pendapat dan pandangan setiap individu. Jadi sebenarnya dengan adanya diagram ini sangatlah bermanfaat bagi perusahaan, tidak hanya dapat menyelesaikan masalah sampai akarnya namun bisa mengasah kemampuan berpendapat bagi orang – orang yang masuk dalam tim identifikasi masalah perusahaan yang dalam mencari sebab masalah menggunakan diagram tulang ikan.

Fungsi dasar diagram Fishbone (Tulang Ikan) adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya . Sering dijumpai orang mengatakan “penyebab yang mungkin” dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apakah penyebab untuk hipotesa adalah nyata, dan apakah memperbesar atau mengurangnya akan memberikan hasil yang diinginkan.

Dari gambar Diagram Fishbone di atas terlihat bahwa faktor penyebab masalah antara lain (kemungkinan) terdiri dari : man (orang), material/bahan baku, money (biaya/anggaran), machine, method/cara dan manajemen. Semua yang berhubungan dengan man, material, money, machine, metode dan manajemen yang “saat ini” dituliskan dan dianalisa faktor mana yang terindikasi “menyimpang” dan berpotensi terjadi masalah.

Pada dasarnya diagram Fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut :

- a) Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah,
- b) Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah,
- c) Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut,
- d) Mengidentifikasi tindakan (bagaimana) untuk menciptakan hasil yang diinginkan,
- e) Membahas issue secara lengkap dan rapi,
- f) Menghasilkan pemikiran baru.

Jadi ditemukannya diagram Fishbone memberikan kemudahan dan menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah yang muncul bagi organisasi.

Dengan mengetahui penyebab utama/akar masalah yang ada, maka dapat dilakukan diskusi dengan memberikan pandangan, masukan dan pendapat dari seluruh tim organisasi (*brainstorming*).

Posible Root Cause	Discusion	Root Cause
<b>Man</b>		
SDM yang masih rendah	Perlu peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan&latihan, pembelajaran secara langsung (learning by doing), dll	N
Budaya kerja tidak tertib (pemetaan tidak tertib dan tersistem)	Kewajiban pemetaan dalam peta tunggal offline kantor yang terpusat sebelum masuk dalam aplikasi KKP	N
<b>Material</b>		
Peta pendaftaran tidak lengkap	Melakukan inventarisasi&digitasi peta pendaftaran yang ada	N
Banyaknya bidang tanah melayang karena tidak ada data (GU dan PP)	Melakukan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dengan metode partisipasi aktif masyarakat	N
<b>Money</b>		
Tidak tersedianya anggaran/biaya peningkatan kualitas data	Mengajukan Rencana Anggaran peningkatan kualitas data dalam RKAKL tahun berikutnya, melakukan optimalisasi anggaran	N
<b>Machine</b>		
Perangkat scanner belum tersedia	Digitasi peta pendaftaran dilaksanakan menggunakan peralatan scanner ditingkat Kanwil	N
Jaringan internet tidak memadai	Pemasangan jaringan internet indihome & dan pemanfaatan tethering jaringan menggunakan Smartphone.	Y
<b>Methode</b>		
Peningkatan kualitas data secara parsial melalui layanan rutin	Melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan secara masih seluruh desa dimulai dari yang paling mudah dan tersedia datanya	N
<b>Managemen</b>		
Belum ada manajemen khusus dalam rangka peningkatan kualitas data	Dibentuknya tim efektif yang bertugas untuk melakukan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan secara masif	N

Tabel 4, Tabel hasil diskusi/brainstorming pencarian akar masalah

### **C. Analisis Kelayakan Inovasi**

Inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka menyongsong era transformasi digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe merupakan syarat mutlak (absolute required) dan harus diprioritaskan pelaksanaan kegiatannya. Hasil analisa organisasi terhadap ketersediaan data base pertanahan diketahui bahwa ketersediaan data base pertanahan yang berkualitas dan valid dalam rangka mendukung layanan pertanahan belum terpenuhi pada kantor pertanahan kabupaten konawe selatan bahkan dapat dibidang memprihatinkan (peringkat kualitas data pertanahan se-Sulawesi Tenggara peringkat kedua dari bawah se Indonesia).

Dengan demikian, inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan pertanahan secara komprehensif. Selain itu, percepatan peningkatan kualitas data pertanahan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan pengguna jasa pertanahan lainnya untuk dapat memperoleh informasi pertanahan secara cepat, mudah dan murah.

#### **1. Kelayakan Administratif**

Inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan, secara administratif bertujuan untuk mewujudkan tujuan organisasi Kementrian ATR/BPN yaitu menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan. Salah satu indikator pengelolaan pertanahan yang berhasil adalah tertiba dministrasi pertanahan yang dikelola secara aman, baik dan terpusat serta mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat. Tertib administrasi pertanahan tidak hanya tertib administrasi data tekstual baik analog maupun digital, tetapi data spasial yang memuat informasi posisi, letak, dimensi, luas dari suatu bidang tanah harus dikelola secara tertib dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta tuntutan masyarakat. Jadi secara administratif, inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan merupakan program prioritas satuan kerja dan bersifat layak untuk dikerjakan secepatnya.

## 2. Kelayakan Sumber Daya (*mapping resources*)

Berdasarkan hasil analisa organisasi dan pemetaan sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan khususnya dalam seksi infrastruktur pertanahan dengan jumlah petugas ukur ASN ada 5 orang, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kepala Subseksi Pemetaan Dasar dan Tematik, serta tenaga ASKB berjumlah 6 orang, kemudian didukung oleh SDM dari PPNPN yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 5 orang, maka berdasarkan analisa sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya (perangkat kerja), inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan layak untuk dapat dilaksanakan.

## 3. Kelayakan Teknis

Inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan secara teknis dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan entry data yang dilakukan di dalam ruangan (studio) kemudian untuk kegiatan pemetaan bidang-bidang tanah dilakukan kegiatan pengambilan data lapangan. Teknis percepatan peningkatan kualitas data dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pemerintah setempat, masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan (pembentukan pokmasdartibnah), sosialisasi pemetaan bidang tanah secara gratis dan membentuk tim efektif untuk percepatan peningkatan kualitas data pertanahan.

Adapun teknis pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan ini menggunakan pemanfaatan teknologi yaitu pemanfaatan Citra Satellite Resolusi Tinggi (CSRT) yang sudah tergeorference, pemanfaatan aplikasi pendukung pemetaan seperti ArcGis, Global Mapper, Survey Tanahku, Autodesk Map dan aplikasi lainnya. Secara teknis inovasi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan layak untuk dikerjakan dan layak untuk diprioritaskan.

## 4. Kelayakan Regulasi

Pelaksanaan aksi perubahan tentang percepatan peningkatan kualitas data pertanahan merupakan tindak lanjut dari aktualisasi PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, PMNA No. 3/1997 serta Petunjuk

teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2020. Peningkatan kualitas data pertanahan, merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menuju era transformasi digital, bahkan peningkatan kualitas data ini diharapkan menjadi fokus kegiatan tahun 2020.



## **BAB IV**

### **STRATEGI MENGATASI MASALAH**

#### **A. Terobosan Inovasi**

Peningkatan kualitas data pertanahan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan untuk mengaktualisasikan asas tertbi administrasi pertanahan berupa ketersediaan data base pertanahan yang berkualitas (Kw1 dan Kw2), terpetakan dengan benar dan valid.

Inovasi peningkatan kualitas data pertanahan ini merupakan inovasi yang bersifat modifikasi dari kegiatan yang telah ada dengan memanfaatkan beberapa aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat peningkatan kualitas data pertanahan. Adapun terobosan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran/edukasi kepada masyarakat, pemerintah setempat dan pengguna jasa pertanahan lainnya untuk dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi bidang-bidang tanah terdaftar melalui aplikasi sentuh tanahku.
2. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran/edukasi kepada masyarakat dan pengguna jasa pertanahan lainnya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam bidang administrasi pertanahan dengan membentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan sebagai media untuk mendapatkan informasi pertanahan
3. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran/edukasi kepada masyarakat dan pengguna jasa pertanahan tentang aplikasi penunjukan informasi melalui aplikasi google map, locus gis, koordinat location serta google form untuk membantu percepatan pemetaan bidang tanah.
4. Melakukan kolaborasi dengan instansi terkait yang memiliki data/informasi pertanahan seperti dinas transmigrasi terkait kegiatan inventarisasi dan identifikasi lokasi transmigrasi.

Inovasi peningkatan kualitas data yang dilaksanakan melibatkan beberapa unsur terkait seperti masyarakat, pemerintah daerah, instansi terkait, sehingga proses pelaksanaan dilaksanakan dengan memenuhi standar/protokol kesehatan pada masa pandemi covid 19.

Sebagai alat bantu yang efektif dalam rangka mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis dan merancang tugas/fungsi program kegiatan dan rencana inovasi organisasi dapat digunakan media berupa model kanvas inovasi sebagai berikut:

<b>MITRA KERJA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM pada kantor pertanahan kabupaten Konsel</li> <li>• Instansi terkait</li> <li>• Pemerintah Kabupaten</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>	<b>KEGIATAN UTAMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entry data</li> <li>• Pemetaan bidang tanah</li> </ul>	<b>NILAI YANG DITAWARKAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kuantitas dan kualitas data pertanahan</li> <li>• Tersedianya informasi pertanahan berbasis bidang</li> </ul>	<b>HUBUNGAN KLIEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patisipasi aktif</li> <li>• Ketebukaan informasi</li> </ul>	<b>TARGET KLIEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat (subyek Hak)</li> <li>• Pemerintah setempat</li> <li>• Pengguna jasa lainnya (user)</li> </ul>
	<b>SUMBER DAYA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASN &amp; PPNPN &amp; ASKB</li> <li>• Perangkat keras &amp; lunak</li> </ul>		<b>PELAYANAN</b> Penggunaan aplikasi sentuh tanahku, google map, google form dll	
<b>UNSUR BIAYA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Rapat/koordinasi/sosialisai</li> <li>• Biaya pengambilan informasi data lapangan</li> </ul>		<b>IMBALAN</b> Tercapainya peningkatan kualitas data pertanahan	<b>RESIKO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dukungan anggaran</li> <li>• Kurangnya dukungan partisipasi masyarakat</li> </ul>	
<b>LEGALITAS</b> Kegiatan peningkatan kualitas data telah sesuai dengan PP 24/1997, PMNA 3/1997 dan proyeksi ATR/BPN 2025		<b>AKUNTABILITAS</b> Hasil peningkatan kualitas data dapat dipertanggungjawabkan/valid	<b>SUSTAINABILITAS</b> Aksi perubahan ini harus dijadikan skala prioritas satker dan konsisten pelaksanaannya	

Gambar 4, Model Kanvas Inovasi

## B. Pentahapan dan Anggaran (Milestone)

Setelah mendeskripsikan tentang rencana yang akan dilaksanakan dalam aksi perubahan peningkatan kualitas data pertanahan, tahapan berikutnya adalah menyusun milestone. Milestone merupakan tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun milestone dalam pelaksanaan aksi perubahan berisi tentang tahapan kegiatan, waktu, output/eviden serta anggaran yang dibutuhkan antara lain :

No	Kegiatan	Waktu	Biaya	Evidence
1	Tahapan Persiapan 1. Koordinasi dengan mentor dan coach 2. Rapat Koordinasi dengan stakeholder internal 3. Pembentukan Tim Efektif	23 s/d 25 Juni 2020	Rp.1000.000,- (ATK,& konsumsi selama Rapat persiapan)	1. Daftar Hadir Rapat 2. SK Tim Efektif 3. Dokumentasi kegiatan
2	Sosialisasi, koordinasi yang di tindak lanjuti dengan : 1. Pembentukan kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan 2. Koordinasi dengan instansi terkait yaitu dinas transmigrasi untuk identifikasi&inventarisasi data 3. Edukasi pemanfaatan aplikasi sentuh tanahku, google map, google form, Koordinat GPS saya dan aplikasi opensourche lainnya.	26 s/d 30 Juni 2020	Rp. 1000.000,- (ATK,& konsumsi selama Rapat persiapan)	1. Berita Acara Rapat Koordinasi 2. Dokumentasi lapangan

No	Kegiatan	Waktu	Biaya	Evidence
3	Tahap implementasi/pelaksanaan kegiatan			
	1. Inventarisasi & identifikasi data buku tanah dan GS/SU	1 s/d 12 juli 2020	Rp. 500.000	1. Dokumentasi kegiatan
	2. Entry data buku tanah dan GS/SU	13 s/d 20 Juli 2020	Rp 500.000	2. Data sebelum dan sesudah peningkatan kualitas data
	3. Inventarisasi dan identifikasi peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan file digital pengukuran	21 s/d 26 Juli 2020	Rp. 500.000	
	4. Scanning peta, rektifikasi peta, digitasi peta	27 s/d 31 Juli 2020	Rp. 1000.000	
	5. Pemetaan persil dan validasi persil dan pengambilan data lapangan	1 s/d 15 Agustus 2020	Rp. 6000.000	
4	Tahapan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan	16 s/d 21 Agustus 2020	Rp. 500.000	Dokumentasi kegiatan

Tabel 5, pentahapan kegiatan dan anggaran (milestone)

### C. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan terkait disini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan aksi perubahan, serta yang mendapatkan dampak atau memanfaatkan hasil dari pelaksanaan aksi perubahan ini. Stake holder dalam pelaksanaan aksi perubahan ini terbagi menjadi dua yaitu :

1) Stakeholder internal

Stakeholder internal dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan fokus peningkatan kualitas data pertanahan Dalam Rangka Menyongsong Era Transformasi Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan adalah :

- a) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara
- b) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan
- c) Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan
- d) ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan
- e) PPNPM dan ASKB pada Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

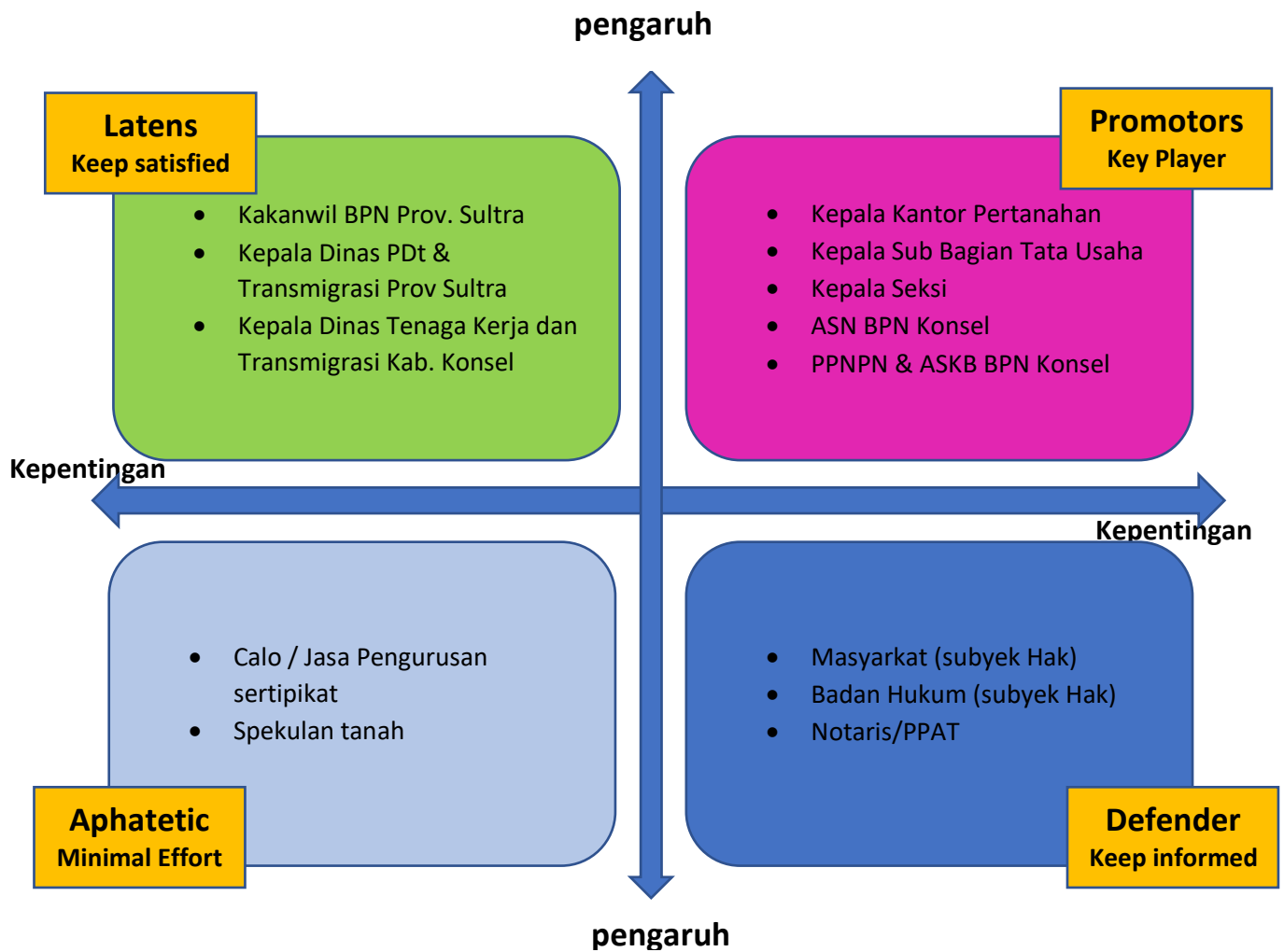
2) Stakeholder eksternal

Stakeholder eksternal dalam pelaksanaan aksi perubahan dengan fokus peningkatan kualitas data pertanahan Dalam Rangka Menyongsong Era Transformasi Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan adalah :

- a) Kepala Dinas PDT & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara
- b) Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan
- c) Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan
- d) Masyarakat dan pengguna jasa layanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Setelah melaksanakan identifikasi stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan, maka perlu dilakukan analisa tentang pengaruh stakeholder dan kepentingannya terhadap pelaksanaan aksi perubahan serta melakukan pemetaan stakeholder dalam peta kwadran stakeholder.

Bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan oleh stakeholder terkait dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat dikemukakan dalam analisa kwadran stakeholder sebagai berikut.



**Gambar 5, pemetaan stakeholders**

Dari hasil pemetaan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat disampaikan bahwa :

1. Kepala Kantor Pertanah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, ASN, PPNPN dan ASKB pada Kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan masuk dalam kwadran Promoters (key player) karena memiliki pengaruh yang besar dan kepentingan yang tinggi, sehingga strategi komunikasi yang diterapkan lebih bersifat informatif dan konsultatif. Pengaruh promotor adalah Memiliki kepentingan besar terhadap aksi perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).

2. Masyarakat, Badan Hukum dan Notaris/PPAT masuk dalam kwadran defender, karena Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi aksi perubahan.
3. Kakanwil BPN Prov. Sultra, Kepala Dinas PDT&Transmigrasi Prov. Sultra, Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Konseil masuk dalam kwadran latens karena, Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam aksi perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan jika mereka menjadi tertarik. Stakeholder Pada kwadran latens mempunyai pengaruh yang besar namun kepentingan yang kecil, berpotensi dapat mempengaruhi keberhasilan aksi, maka perlu strategi komunikasi persuasive yang baik agar dapat positif mendukung pelaksanaan Aksi perubahan.
4. Calo/jasa pengurus sertipikat tanah, spekulan tanah masuk dalam kwadran apathetic karena Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya aksi perubahan.

#### **D. Hasil dan Manfaat Inovasi**

Hasil dan manfaat inovasi perubahan dengan fokus peningkatan kualitas data pertanahan ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

##### **1. Jangka Pendek**

Output Jangka Pendek (Selama 2 bulan masa Implementasi Aksi Perubahan) yaitu :

- a) Data base pertanahan dapat dientry dalam aplikasi baik berupa buku tanah, GS/SU,
- b) Peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, Gambar Ukur dapat diinventarisir dan teridentifikasi guna menunjang peningkatan kualitas data.
- c) Meningkatnya kualitas data pertanahan walaupun relatif kecil dan sedikit (1 desa)

## 2. Jangka Menengah

Output jangka menengah aksi perubahan ini adalah meningkatnya jumlah data base pertanahan yang berkualitas baik (Kw1 dan Kw2), valid dalam beberapa desa/kelurahan.

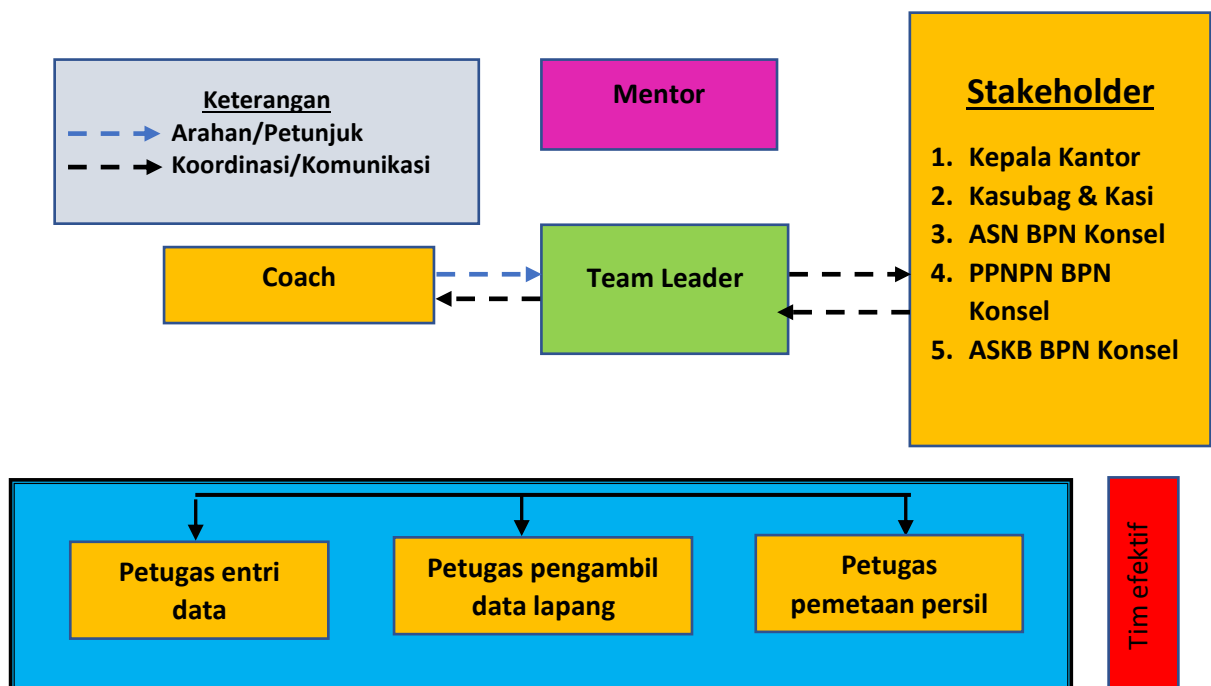
## 3. Jangka Panjang

Output jangka panjang aksi perubahan ini adalah tercapainya kualitas data pertanahan yang berkualitas dan valid pada seluruh bidang-bidang tanah terdaftar yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan (perlu kerja keras).

### E. Pemanfaatan Sumber Daya

Pelaksanaan pelaksanaan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka menyongsong era transformasi digital pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik berupa sumber daya manusia dan sumber daya berupa perangkat keras dan perangkat lunak.

Aktualisasi dari pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah membentuk tim kerja, jejaring kerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan aksi perubahan.



Gambar 6, struktur tim kerja aksi perubahan



## Tugas dan Tanggungjawab Tim Kerja Aksi Perubahan

1. Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) Memberikan arahan, motivasi dalam pelaksanaan aksi;
  - b) Memberikan masukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan aksi;
  - c) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas Pemimpin aksi secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
  - d) Memberikan dukungan penuh kepada Pemimpin aksi;
  - e) Membantu Pemimpin aksi Perubahan dalam memetakan tahapan dan langkah aksi yang akan dilaksanakan;
  - f) Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi Pemimpin aksi dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan aksi;
  - g) Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi.
2. Team Leader mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut
  - a) Memimpin jalannya aksi perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksana, penjadwalan, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan mentor dan coach;
  - b) Memberikan arahan strategi kepada Tim;
  - c) Menyusun rencana kerja Tim;
  - d) Mengkoordinasikan kegiatan;
  - e) Melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan dengan Stakeholders;
  - f) Melaporkan pelaksanaan aksi dan hasilnya;
  - g) Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim
3. Tim Entri Data mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi buku tanah, GS/SU yang belum terentry dalam aplikasi KKP
  - b) Melaksanakan kegiatan entry data buku tanah, GS/SU dalam aplikasi KKP
  - c) Melakukan validasi data tekstual buku tanah dan GS/SU dalam aplikasi KKP

4. Tim pemetaan persil Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi data spasial berupa peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan Gambar Ukur baik analog dan digital
  - b) Melaksanakan proses scanning / penyiaman, digitasi dan rectifikasi (georeference) data peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran.
  - c) Melaksanakan kegiatan pemetaan bidang tanah dan validasi bidang tanah pada peta pendaftaran digital dalam aplikasi KKP.

#### **F. Pengawasan dan Pengendalian Pekerjaan**

Untuk mengetahui kegiatan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan, atau terdapat kendala, hambatan dan penyimpangan kegiatan harus dilaksanakan teknik pengawasan dan pengendalian pekerjaan. Teknik pengawasan dan pengendalian dilaksanakan untuk :

1. Memantau kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
2. memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.
3. pengaturan aktivitas organisasi secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kerja

Dengan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan maka akan menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya sasaran organisasi. Adapun tujuan dari pengawasan dan pengendalian pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. adaptasi lingkungan
2. meminimalkan kegagalan
3. meminimumkan biaya
4. mengantisipasi kompleksitas dari organisasi

pengawasan dan pengendalian pekerjaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan manajemen resiko yang bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan yang dapat menghambat dan menggagalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## **G. Standar Operasi Prosedur Pelayanan Publik**

Setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untuk meniadakan atau mengurangi resiko/kesalahan. Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan publik merupakan prosedur/tata cara kerja/tata urutan pelaksanaan kerja yang sudah ditetapkan dengan standart tertentu yaitu :

1. Dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis.
2. Tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dialui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan publik bertujuan untuk :

1. Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau tim dalam organisasi atau unit.
2. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas terkait.
4. Melindungi organisasi dan staf dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
5. Menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan tidak efisiensi.

Fungsi Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan publik adalah :

1. Memperlancar tugas petugas /tim.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Adapun SOP aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data ini, SOP telah diatur dalam petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2020.

## BAB V

### PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

#### A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

Proses kepemimpinan secara singkat sering dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Orang lain disini bisa diartikan sebagai orang-perorang, atau sekelompok orang. Akan tetapi karena orang banyak itu terdiri dari individu dengan kebutuhan yang bervariasi, diperlukan kiat-kiat khusus untuk mengatur supaya kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang bermacam-macam tersebut bisa terakomodasi sehingga timbul dorongan atau motivasi untuk secara mandiri bekerja mencapai tujuan pribadi maupun kelompok. Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kepemimpinan, karena memimpin adalah memotivasi.

Proses kepemimpinan dalam melaksanakan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari 3 hal utama yaitu :

##### **1. Membangun Integritas**

Integritas adalah suatu bentuk kejujuran yang diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif di antara mereka.

Dalam Aksi perubahan ini, implementasi dari membangun integritas adalah dengan membuat komitmen bersama, saling mendukung, saling percaya untuk mencapai tujuan aksi perubahan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan mentor yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan ini melibatkan juga stakeholder internal yang terdiri dari bagian Tata Usaha, Seksi IP dan Seksi HHP serta tim teknis lainnya. Adapun dalam koordinasi dilakukan untuk membentuk komitmen bersama tentang pentingnya peningkatan kualitas data pertanahan dalam rangka mendukung layanan

pertanahan derivatif serta menyongsong era transformasi digital dalam lingkup layanan pertanahan serta dukungan dari mentor dan stakeholder internal.



**Gambar 7, Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan dan stakeholder internal lainnya**

## **2. *Pengelolaan Budaya Pelayanan***

Pelayanan pertanahan merupakan salah satu jenis layanan publik yang bertujuan untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik dihasilkan dari budaya pelayanan yang diciptakan secara sadar. Tanpa kehadiran budaya pelayanan yang unggul, pelayanan publik menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten. Semua janji pelayanan, slogan pelayanan, sosialisasi pelayanan, semangat pelayanan, akan menjadi sia-sia, bila semua itu tidak dibangun melalui budaya organisasi yang kuat. Intinya, semua ambisi dan obsesi pemimpin untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat tidak akan jalan di lapangan. Sebab, orang-orang di garda depan pelayanan belum memiliki budaya yang kuat untuk memberikan pelayanan seperti impian pemimpin. Orang-orang di garda depan pelayanan belum terlatih sikapnya, kebiasaan, perilaku, reaksi, emosi, kata-kata, dan penampilan yang sesuai dengan janji dan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dengan profesional.

Budaya pelayanan membutuhkan perubahan pola pikir dari setiap individu pegawai pemerintah. Perubahan pola pikir tersebut tidak lagi merasa sebagai pemilik kekuasaan, tetapi merasa sebagai pelayan

masyarakat. Saat setiap individu pegawai pemerintahan sudah mampu memiliki mindset sebagai pelayan publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh.

Pelayanan publik yang baik dan unggul adalah yang mempermudah semua proses dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa dibantu oleh negara dengan baik.



### **3. *Pengelolaan Tim***

Pengelolaan Tim dalam aksi perubahan ini dilaksanakan dengan teknik menciptakan dan membangun tim kerja yang efektif serta menyusun keanggotaan tim efektif tersebut.

Pembentukan Tim efektif dilakukan setelah komitmen dan dukungan telah diperoleh dalam rapat koordinasi internal dengan mentor dan stakeholder internal. Tim Efektif dalam pelaksanaan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan pada Kanror pertanahan Kabupaten Konawe Selatan melibatkan stakeholder internal yang memiliki peran tugas dan tanggungjawab masing-masing.

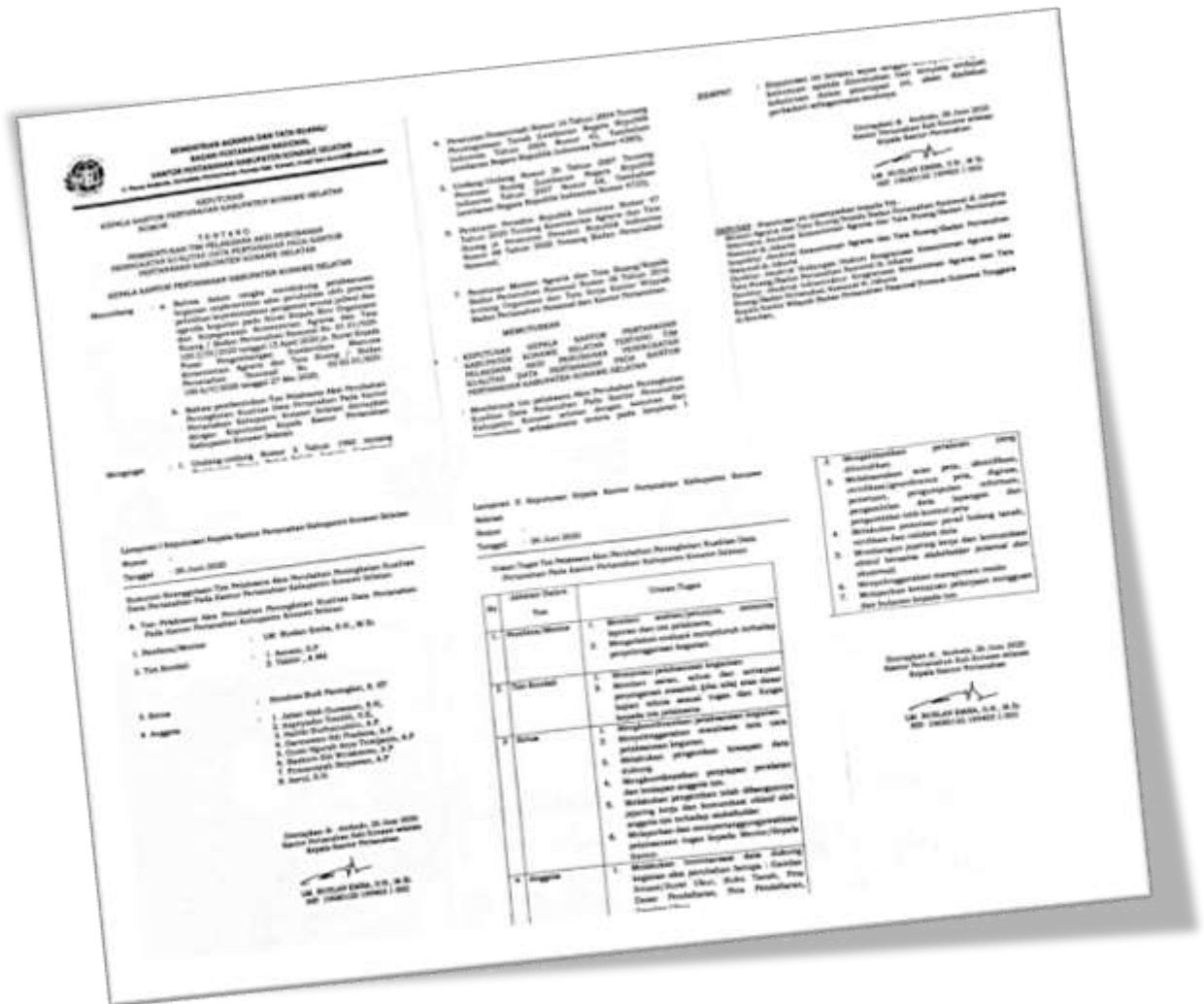
Adapun susunan dari Tim efektif pelaksanaan aksi perubahan ini dibuatkan dalam bentuk SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun struktur dan uraian tugas tim efektif adalah :

Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim Efektif		
No	Keanggotaan	Uraian Tugas
1	Mentor : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan	Membantu dan mengarahkan pelaksanaan aksi perubahan Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan
2	Tim Kendali : Kepala SubBagian Tata Usaha Kepalas Seksi Penataan Pertanahan	Memantau pelaksanaan kegiatan Memberi saran, solusi dan antisipasi penanganan masalah
3	Project Leader : Kepala seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan	Menyusun jadwal pelaksanaan proyek perubahan; Berkoordinasi dengan kepala kantor pertanahan selaku mentor dan stakeholder internal maupun eksternal dalam pelaksanaan aksi perubahan Bertanggungjawab dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan aksi perubahan secara keseluruhan Membuat laporan hasil pelaksanaan aksi perubahan kepada kepala kantor pertanahan selaku mentor
4	Anggota : Petugas entry data Petugas pengambil data lapangan Petugas pemetaan bidang tanah	Melakukan Inventarisasi data dukung kegiatan aksi perubahan berupa : Gambar Situasi/Surat Ukur, Buku Tanah, Peta Dasar Pendaftaran, Peta Pendaftaran, Gambar Ukur Mengalokasikan peralatan yang dibutuhkan. Melaksanakan scan peta, identifikasi, rectifikasi/georeference peta, digitasi, pemetaan, pengumpulan informasi, pengambilan data lapangan dan pengambilan titik kontrol peta.

		<p>Melakukan pemetaan persil bidang tanah, verifikasi dan validasi data</p> <p>Membangun jejaring kerja dan komunikasi efektif bersama stakeholder (internal dan eksternal).</p> <p>Menyelenggarakan manajemen resiko</p> <p>Melaporkan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan kepada tim.</p>
--	--	---

Tabel 6, keanggotaan dan uraian tugas tim efektif



Gambar 8, SK tim Efektif

## B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan proses mempengaruhi perilaku dan aktivitas individu atau kelompok serta menyediakan situasi dalam usaha pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari



kelompok itu yaitu tujuan bersama. Keberhasilan pemimpin pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas kepemimpinannya. Bila produktiftas naik dan semua tugas dilaksanakan tugas secara efektif, maka ia disebut sebagai pemimpin berhasil.

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, tolok ukur keberhasilan aksi perubahan dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :

### 1. **Capaian Tahapan Inovasi**

Capaian tahapan inovasi dalam aksi perubahan ini dapat dilihat dari proses peningkatan kualitas data pertanahan mulai dari persiapan, pembentukan tim efektif, identifikasi dan inventarisasi, digitasi sampai tahap pemetaan bidang tanah sehingga data mengalami peningkatan kualitas.

Pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan dengan melakukan pengelompokan pekerjaan menjadi dua yaitu pelaksanaan pekerjaan studio/dalam ruangan dan pelaksanaan pekerjaan lapang.

#### 1) Pelaksanaan Pekerjaan Studio/Dalam Ruangan

Pelaksanaan pekerjaan studio/dalam ruangan yang dilaksanakan antara lain yaitu:

- a) Identifikasi, Inventarisasi dan entry data Buku Tanah dan Gambar Situasi/Surat Ukur. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan alih data dari data analog menjadi data digital dengan memasukkan data dalam sistem aplikasi KKP.

Inventarisasi BT, GS/SU



Gambarl 9, Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi dan Entry BT, GS/SU

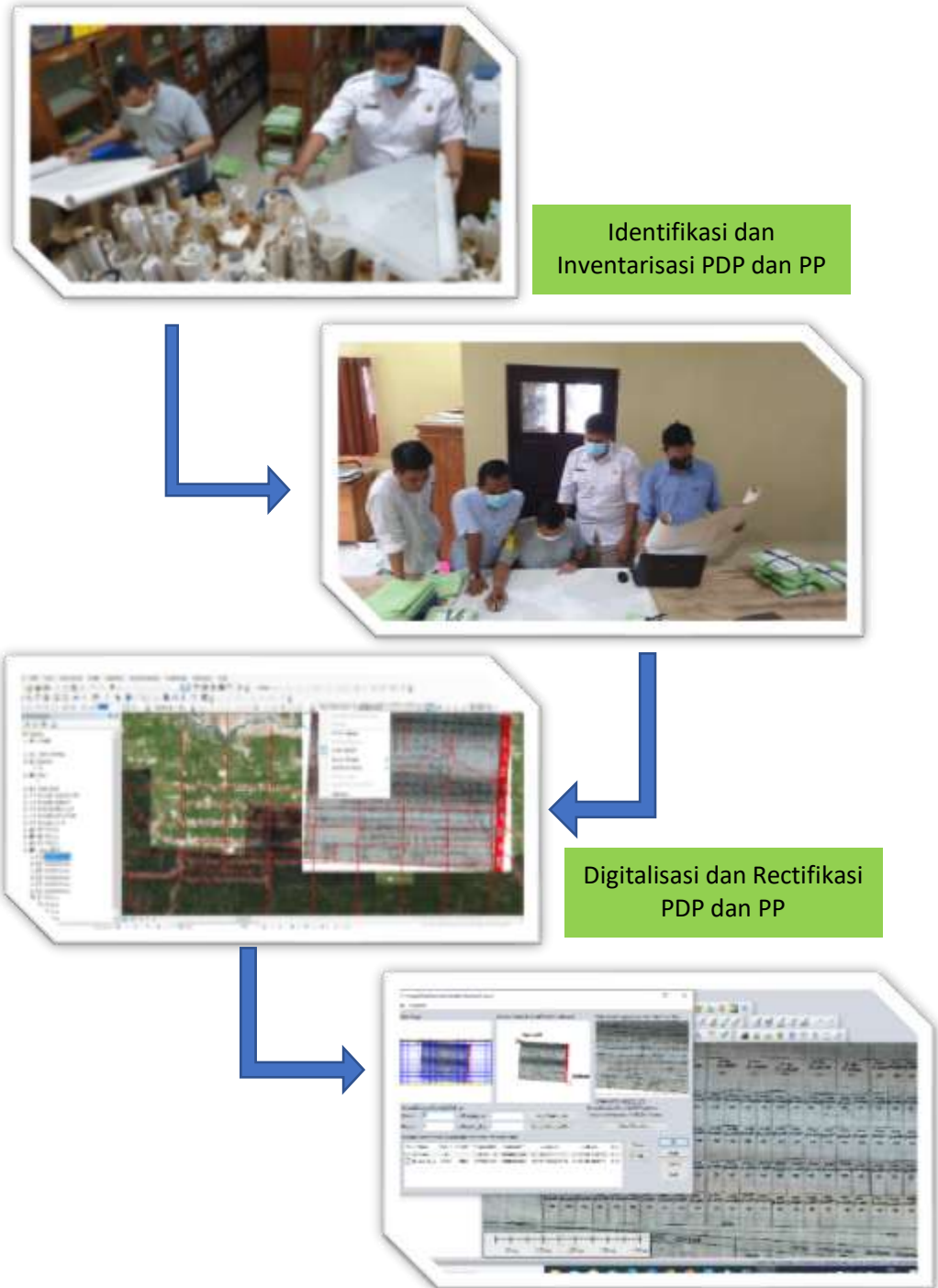


Entry data BT, GS/SU



Scan data BT, GS/SU

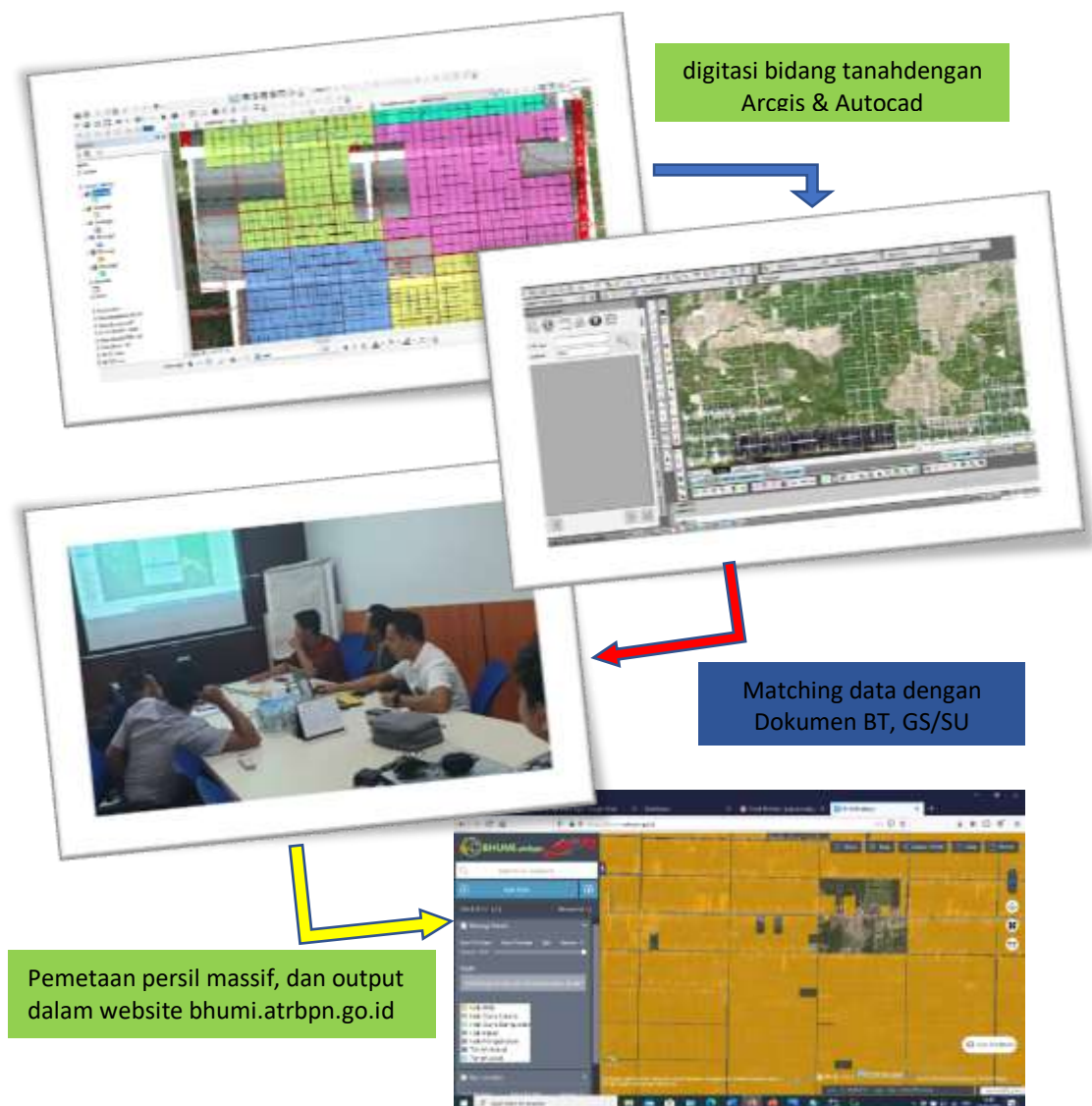
- b) Identifikasi, Inventarisasi, Scan/digitalisasi Warkah spasial yang terdiri atas Peta Dasar Pendaftaran, Peta Pendaftaran. Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Pendaftaran yang masih berupa data analog di inventarisir, scanning/digitalisasi data untuk proses digitasi dan rectifikasi data.



Gambar 10, Kegiatan Identifikasi, Inventarisasi PDP dan PP

c) Rectifikasi/Georeference, Digitasi dan pemetaan persil bidang tanah. Setelah Peta Dasar Pendaftaran dan Peta Pendaftaran dilakukan scan/penyiamapan data, rectifikasi dan digitasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemetaan persil (menu pempers dalam AutocadMap) sehingga menghasilkan peta pendaftaran yang dapat diakses dalam KKP Web, Sentuh tanahku, survey tanahku dan Bhumi.atrbpn.go.id.

Sebelum dilakukan pemetaan persil data hasil harus dapat dipastikan sudah terpetakan dengan benar (**true position**). maka tahapan berikutnya adalah melakukan pemetaan persil dalam aplikasi KKP dengan merujuk pada data NIB, No Hak, GS/SU.



Gambar 11, Pengolahan data hasil scan dan rectifikasi s/d output peta pendaftaran online

## 2) Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan

Pelaksanaan pekerjaan lapangan dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah desa/kelurahan tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan dimlai dari terpetakan data bidang-bidang tanah masyarakat yang telah terdaftar. Selain itu edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dengan melakukan plotting mandiri melalui aplikasi sentuh tanahku, atau mengirim data koordinat share lokasi googlemaps, koordinat GPS saya yang dapat diunduh di playstore/appstore secara gratis.



Gambar 12, Sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait

Selain itu, pekerjaan lapangan dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan adalah melakukan pengambilan data lapang untuk titik-titik kontrol yang teridentifikasi dalam peta pendaftaran dan teridentifikasi dilapangan. Apabila tidak ditemukan peta dasar atau peta pendaftaran, maka peningkatan kualitas data harus melakukan pengukuran kembali/pengukuran ulang.



Gambar 13, Kegiatan lapang peningkatan kualitas data pertanahan

## 2. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Layanan

Capaian dalam perbaikan sistem layanan dalam aksi perubahan dapat dilaporkan dalam capaian/progress kegiatan peningkatan kualitas data sebagai berikut :

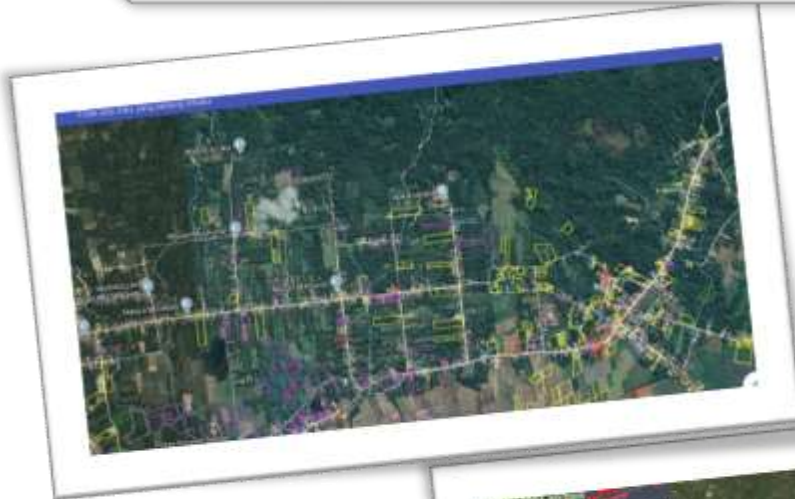
Terdapat peningkatan kualitas data pertanahan terhadap desa/kelurahan yang dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan dalam jangka pendek.

**Kondisi kualitas data desa Lamong Jaya sebelum dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan**

Total data :		541	35	17	0	0,0	0,488	0,23	9,3
Kode	Nama Wilayah	Buku Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4 (Buku Internal/ Jaminan)	KW 5 (Buku Internal/ Jaminan)	KW 6 (Buku Internal/ Jaminan)	Persebaran
1 21071807	LAMONG JAYA	541	35	17	0	0,0	0,488	0,23	9,3

Total Data :		541	35	17	0	0,0	0,488	0,23
Kode	Nama Wilayah	Jumlah Buku Tanah	Jumlah Valid Buku Tanah	Jumlah Surat Ukur	Jumlah Valid Surat Ukur	Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Valid Bidang Tanah	
1 21071807	LAMONG JAYA	541	35	17	0	0,0	0,488	0,23



**Jumlah data**  
**KW1 : 35**  
**KW2 : 17**  
**SU valid : 28**  
**Bidang Tanah Valid : 28**

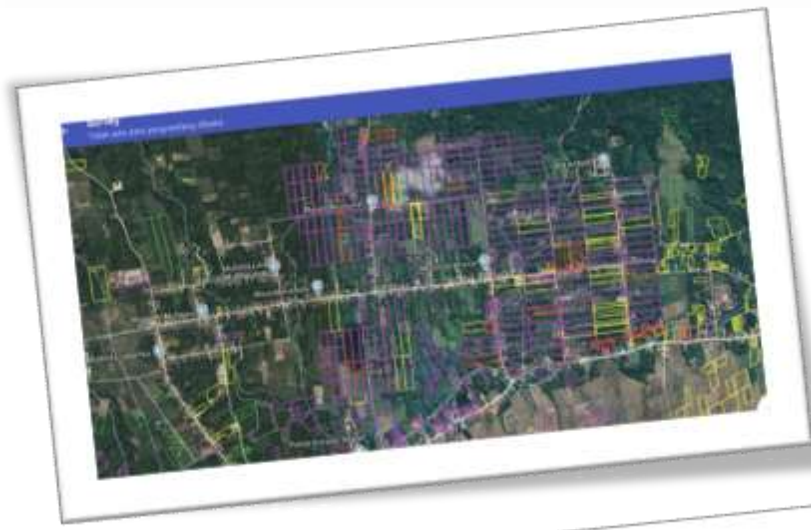
Gambar 14, Kualitas data desa lamong jaya sebelum peningkatan kualitas data



Kondisi kualitas data desa Lamong Jaya setelah dilakukan peningkatan kualitas data pertanahan

Total data :		363	35	227	0	519	11.339	11.273	55.43
Kode	Nama Wilayah	Bidang Tanah	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	Persebaran
1	21071807 - LAMONG JAYA	363	35	227	0	519	11.339	11.273	55.43

Total data :		363	35	227	0	519	11.339	11.273	55.43
Kode	Nama Wilayah	Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Valid Bidang Tanah	Jumlah Tidak Valid Bidang Tanah	Jumlah Valid Sertifikat	Jumlah Tidak Valid Sertifikat	Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Valid Bidang Tanah	Jumlah Tidak Valid Bidang Tanah
1	21071807 - LAMONG JAYA	363	35	227	0	519	11.339	11.273	55.43

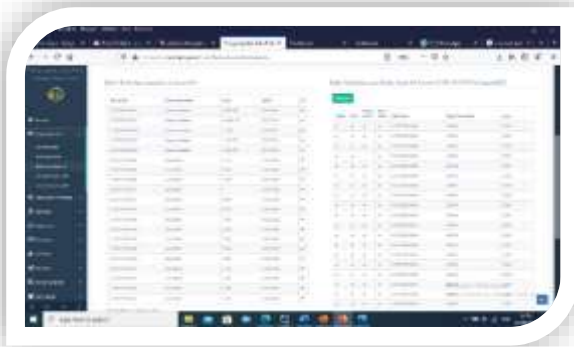
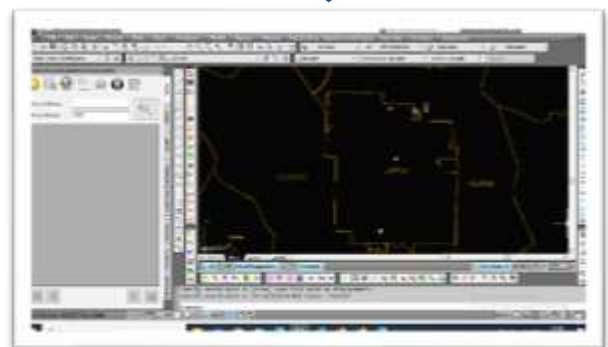
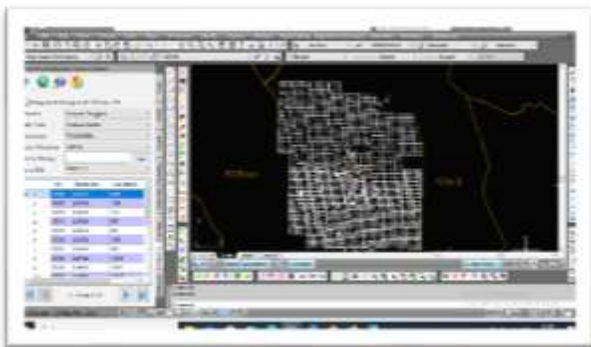


Jumlah data  
 KW1 : 35  
 KW2 : 227  
 SU valid : 551  
 Bidang Tanah valid : 241



Gambar 15, Kualitas data desa lamong jaya setelah peningkatan kualitas data

**Kegiatan Peningkatan Kualitas data dalam lokasi PTSL 2020  
Output berupa kluster 4, kejar tayang desa lengkap**



NO	NAMA DESA	Jumlah	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	BIRWA MARION	30		30	30	0												
2	LAKSA	207	0	207	207	0												
3	LALOWU	89	57	89	89	57												
4	ANZATA	217	184	217	217	184												
5	SANDANSIH AJYA	150		150	150	184												
6	PULUWALI	0	184	0	0	0												
7	CONIMUTE	549	229	549	549	229												
8	COMBLEA	116	93	116	116	93												
9	COMBLEA	254	164	254	254	164												
10	SIATI BALI	45	0	45	45	0												
	<b>Total</b>	<b>1844</b>	<b>872</b>	<b>1844</b>	<b>1844</b>	<b>872</b>												

Gambar 16, Peningkatan kualitas data pada lokasi PTSL



### 3. **Manfaat Aksi Perubahan**

Manfaat aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yaitu berimplikasi pada meningkatnya performa/kinerja layanan pertanahan derivatif/turunan serta memberikan informasi data pertanahan yang valid kepada masyarakat / user sebagai pengguna jasa layanan.

Dashboard kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan pada khususnya dan Kementrian ATR/BPN pada umumnya dapat secara langsung dilihat dan diakses oleh masyarakat dalam bentuk aplikasi **sentuh tanahku**, peta online pertanahan <https://bhumi.atrbpn.go.id>.

Dengan peningkatan kualitas data pertanahan secara menyeluruh, informasi pertanahan yang berbasis bidang tanah akan dapat diakses secara terbuka untuk dilakukan analisa data selanjutnya misal dengan data RTRW, data ZNT, Kawasan Hutan, LP2B, Ijin Lokasi, Neraca Penggunaan Tanah dan lainnya, sehingga tercipta informasi pertanahan yang detail berbasis bidang tanah melalui sistem informasi yang praktis dengan inovasi dan berbagai macam kolaborasi.

Secara teoritis dan teknis, peningkatan kualitas data pertanahan merupakan skala prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam rangka menuju transformasi digital layanan pertanahan dan menuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif.

Untuk mengejar skala prioritas utama, berupa aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, namun terdapat berbagai kendala yang dihadapi mulai dari kendala teknis, anggaran dan kendala non teknis yang menghambat progress dan validitas hasil peningkatan kualitas data pertanahan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaak aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan serta alternatif solusinya adalah sebagai berikut :

No.	Kendala yang dihadapi	Alternatif solusi
1	Tim Efektif lebih mengutamakan pekerjaan program strategis (PTSL&redist), lomba desa lengkap, rutin	Mendorong dan memotivasi tim efektif untuk berkomitmen menyelesaikan tugas dengan manajemen waktu yang baik.
2	Tidak tersedia anggaran yang mendukung kegiatan aksi perubahan	Melakukan kerjasama dan kolaborasi pekerjaan dengan memanfaatkan potensi dan komitmen untuk meningkatkan kualitas data pertanahan
3	Tidak tersedia data dukung peningkatan kualitas data seperti Peta Dasar Pendaftaran, Peta Pendaftaran, Gambar Ukur/Veldwerk,	Melakukan pengukuran kembali / ulang langsung kelapangan dengan didukung BA penataan batas apabila terdapat perubahan data fisik.
4	Data Peta dan Gambar Ukur tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan, rusak, informasi bidang melayang, tidak bisa directifikasi/georeference.	Dilakukan pengukuran ulang dengan metode partisipatif / sensus bidang tanah.
5	Banyak Buku Tanah, GS/SU yang belum terentry dalam KKP	Membentuk tim entry data pertanahan.
6	Banyaknya bidang tanah yang tumpang tindih, sertipikat ganda, luas intoleransi, dan efek pemekaran wilayah administrasi	Perlu penataan kembali bidang-bidang tanah dengan mengikuti prosedur yang berlaku.
7	<b><i>Kesadaran,partisipasi masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi pertanahan yang masih begitu rendah.</i></b>	<b><i>Sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pertanahan.</i></b>

Tabel 7, Kendala dan alternatif solusi yang ditemui dalam aksi perubahan

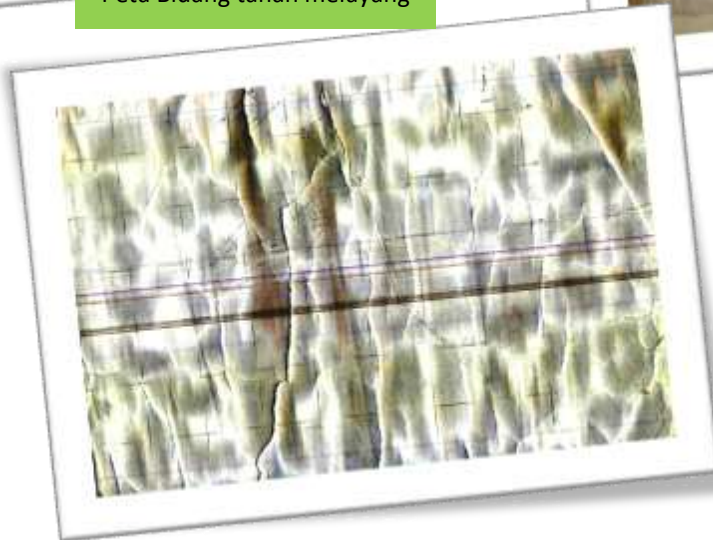
Gambar 17, Kondisi Peta Pendaftaran yg rusak, melayang dkk



Peta Bidang tanah melayang



Peta Pendaftaran Rusak



Peta Buta

### C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Keberlanjutan suatu program didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan fungsi dari jasa-jasa yang telah diatur dalam suatu program tetap berfungsi tanpa adanya bantuan dari pihak luar (Moningka, 2010).

Keberlanjutan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menuju era transformasi digital pertanahan yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pada level kantor pertanahan kabupaten/kota.

Keberlanjutan (sustainability) aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan harus dikerjakan mulai dari kegiatan jangka pendek dengan melakukan analisa organisasi, kegiatan jangka pendek dengan menetapkan target capaian jangka menengah dan capaian jangka panjang.

## **1. Legalitas Penerapan Inovasi**

Pelaksanaan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe selatan secara inovasi berupa modifikasi dari inovasi yang telah ada sebelumnya. Penerapan inovasi dalam aksi perubahan ini tidak melanggar aturan/legalitas dari aspek pertanahan, bahkan merupakan tindak lanjut dari serangkaian peraturan pertanahan yang ada guna mendukung proyeksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2025 dalam era transformasi digital.

Legalitas penerapan inovasi dalam aksi perubahan tidak perlu dibuatkan lagi, mengingat peningkatan kualitas data pertanahan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang harus dituntaskan terlebih dahulu.

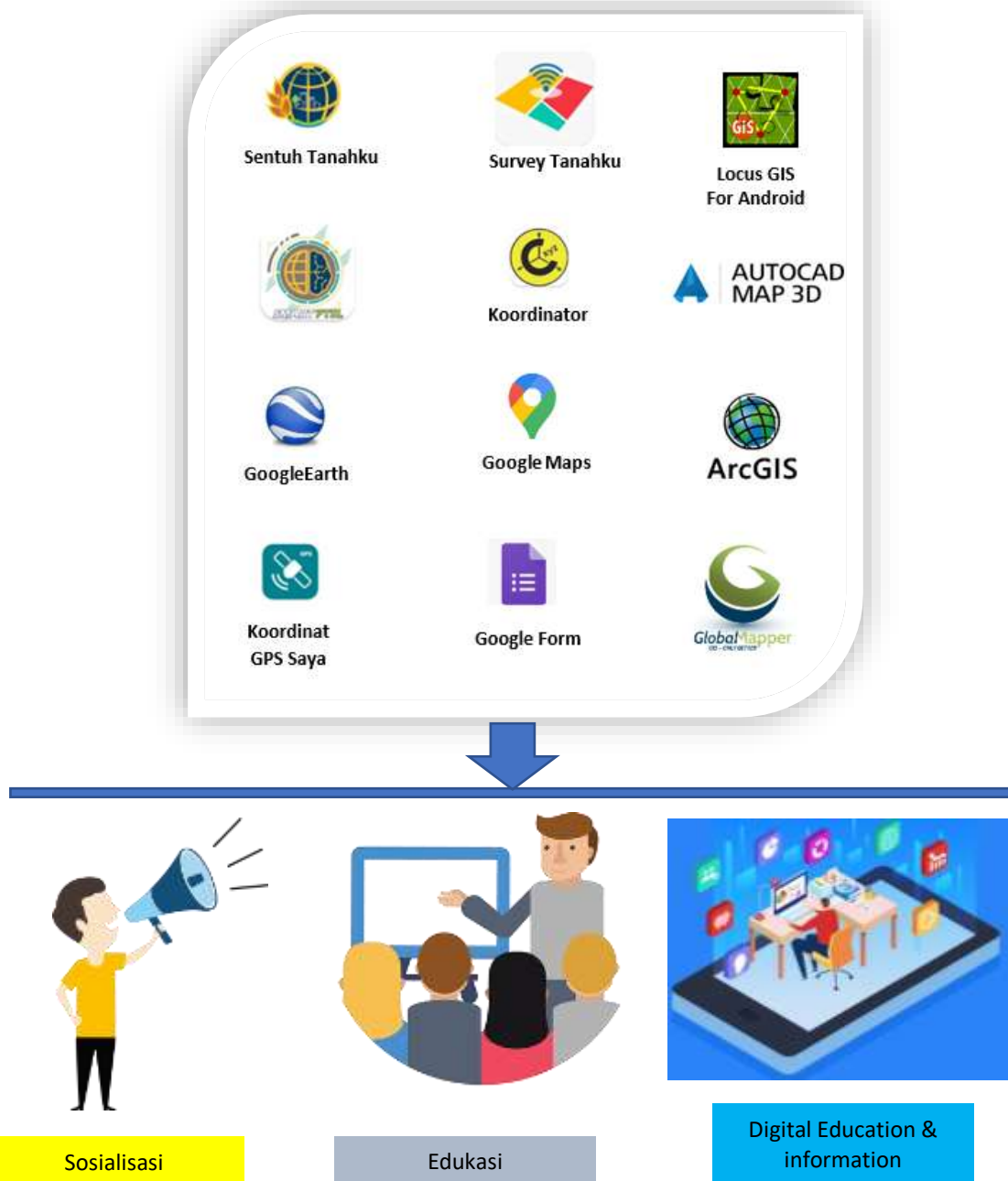
## **2. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi**

Keberlanjutan inovasi dalam aksi perubahan harus dilaksanakan secara massif dengan komitmen dan tujuan yang sama berupa peningkatan kualitas data pertanahan merupakan infrastruktur pertama yang harus diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk mendukung layanan pertanahan lainnya, baik layanan pertanahan originer maupun derivatif.

Aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan dengan memaksimalkan aplikasi gratis (open source) yang ada seperti sentuh tanahku, googlemaps, koordinat gps saya, googleform belum optimal untuk dilaksanakan dalam locus aksi perubahan ini. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan, ekonomi, jaringan serta ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam bidang pertanahan masih sangat rendah.

Dari partisipasi masyarakat dengan menggunakan aplikasi sentuh tanahku, saat ini baru terdapat 48 bidang tanah hasil pemetaan partisipatif masyarakat. Berdasarkan hasil verifikasi dalam rangka melakukan validasi data, ditemukan bidang-bidang tanah hasil pemetaan partisipatif yang tidak layak untuk dilakukan validasi.

Dengan demikian, perencanaan keberlanjutan inovasi dalam aksi perubahan dalam hal memaksimalkan perangkat/aplikasi yang sudah ada dapat berjalan dengan efektif apabila didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan pengetahuan masyarakat yang tinggi pula. Untuk dapat mendukung keberhasilan inovasi tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara massif baik secara langsung tatap muka, melalui media elektronik, media cetak, media digital serta perlu dilakukan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.



Gambar 18, Sosialisasi & Edukasi aplikasi pendukung layanan peningkatan kualitas data

Patisipasi masyarakat dalam bidang pertanahan melalui aplikasi sentuh tanahku saat masih sangat rendah, tolok ukur dari partisipasi masyarakat adalah data pemetaan partisipatif dalam melalui sentuh tanahku yang masuk ke aplikasi KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan masih sedikit, selain itu kualitas data hasil pemetaan partisipatif masih sangat rendah dan tidak dapat dilakukan validasi.



Gambar 19, kondisi pemetaan partisipatif melalui aplikasi sentuh tanahku

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian laporan aksi perubahan tentang peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan ini kami susun untuk dapat diseminarkan di depan penguji dalam rangka untuk melakukan tindak lanjut aksi perubahan jangka menengah dan jangka panjang. Dari rangkaian kegiatan aksi perubahan dengan melakukan peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan oleh penulis, dapat ditarik benang merah berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Berdasarkan analisa organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, diketahui bahwa ketersediaan data pertanahan yang masuk dalam sistem aplikasi KKP berupa data base Buku Tanah (BT), Gambar Situasi/Surat Ukur (GS/SU), bidang tanah (NIB) masih memiliki kualitas yang masih rendah, sehingga peningkatan kualitas data pertanahan mutlak harus menjadi prioritas utama bagi organisasi tersebut.
- 2) Saat ini terdapat beberapa peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran analog yang masih ada dan cukup informatif, terutama peta hasil kegiatan transmigrasi, SRADP, PIADP, gersamata, prona, redistribusi TOL yang dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemetaan persil melalui scan data, rectifikasi/gereference, digitasi, entry data link data sehingga menjadikan data yang ada meningkat level kualitas datanya.
- 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan memiliki jumlah/volume layanan rutin yang cukup terutama layanan derivatif sehingga peningkatan kualitas data mutlak harus mampu mengimbangi dan dilaksanakan secara massif untuk meningkatkan kinerja layanan pertanahan.
- 4) Peningkatan kualitas data pertanahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka menyongsong era transformasi digital layanan pertanahan.

- 5) Proyeksi Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yaitu mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah di NKRI, menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan kolaborasi, Memberlakukan stelsel positif atau asuransi pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan tidak akan terwujud jika peningkatan kualitas data pertanahan belum sepenuhnya dilaksanakan.

## **B. Rekomendasi**

1. Perlu dibuatkan skala prioritas pada seluruh unsur pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe selatan dalam rangka meningkatkan kualitas data pertanahan secara massif dan menyeluruh, mengingat data pertanahan yang harus ditingkatkan kualitasnya sangat banyak yaitu kurang lebih 90 ribu data pertanahan (gabungan dari BT,GS/SU dan NIB).
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara massif dan berkelanjutan pada desa demi desa, kecamatan demi kecamatan tentang pentingnya peningkatan kualitas data pertanahan baik secara langsung dilapangan, maupun melalui media sosial dan media lainnya.
3. Seluruh jajaran ASN, PPNP dan ASKB yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan harus memiliki komitmen yang kuat, loyal dan pekerja keras untuk menyelesaikan/menambal lubang yang begitu besar melalui peningkatan kualitas data pertanahan.



# LAMPIRAN

## Daftar Hadir Rapat pembentukan SK Tim Efektif

**DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI  
DAN PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN**

Hari: Selasa, 21 Juni 2020

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	L.N. Ruda Erika	Ketua	
2	Adeni ST	KRU	
3	Harini Duli Purigat	Kel II	
4	Sudar Abdi S	Ketua Pemas	
5	Aspriata Tambi	Ketua Timor	
6	Tektu	KRU PP	
7	Hasul	Ketua Pemas	
8	Burhan Ed W	Manajer Ukar	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## SK Tim Efektif

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
Jl. Petae Sudaiki, Komplek Pemerintahan Pemda Kab. Konawe, Email: kpt@kpsk.konawe.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR: 30 / KP/ S/ W/ 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN  
PENGUKUTAN KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Mencanangkan

- a. Seseorang dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan implementasi aksi perubahan aksi nyata perbaikan pengumpulan program awal jafard dan upaya kegiatan pada Kantor Kepala Bina Organisasi dan Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 01.01/929-100.3/79/2020 tanggal 15 April 2020 in Rupa Resmi Pusat, Pengumpulan Sasarannya Monev Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 02.02.01/025-100.4/4/2020 tanggal 27 Mei 2020;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Agraria Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 504, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2045);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewilayahan Indonesia Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3096);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan Ruang Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang in Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;

MENCANTUKAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKSI PERUBAHAN PENGUKUTAN  
KUALITAS DATA PERTANAHAN PADA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Sehubungan itu pelaksanaan Aksi Perubahan Pengumpulan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan dilaksanakan dengan menggunakan timnya pada lampiran 1 keputusan ini;

Agar Tim Pelaksana Aksi Perubahan Pengumpulan Kualitas Data Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan dapat DITUNJUKKAN secara resmi tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini;

Agak maka yang terlibat sebagai pejabat ditandatangani keputusan ini ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan (SK) Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan Tahun Anggaran 2020 yang telah dan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di: Andaha, 26 Juni 2020  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan

L.N. RUDA ERIKA, S.P., M.P.  
NIP. 19661201 199403 1 002

Keputusan ini ditandatangani kepada Tim:  
1. Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta  
2. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta  
3. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
4. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
5. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
6. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
7. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
8. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
9. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
10. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
11. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
12. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
13. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
14. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan  
15. Kantor Pertanahan Kabupaten KonaWE Selatan


## Dukungan dari Kasubag TU

**LEMBAR PERNYATAAN DUKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anani, S.P.  
 NIP : 19601211 200811 2 001  
 Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

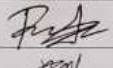






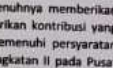
Dengan ini saya menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Hendras Budi paningsat, S.ST. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan aksi peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Saya sepenuhnya memberikan dukungan terhadap aksi perubahan tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, serta dapat memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Diklat PKP) angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN melalui distance learning.

Anibaka, 29 Juni 2020  
 Pembuat Pernyataan  
  
 Anani, S.P.

## Dukungan dari Tim Efektif

**LEMBAR PERNYATAAN DUKUNGAN KESANGGUPAN  
 MELAKSANAKAN KEGIATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami tim efektif aksi perubahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan :

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Jabar Abdi Gunawan, S.H.	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	
2	Aspriyadin Tombili, S.E.	Kepala Sub Seksi Pengukuran Dasar dan Tematik	
3	Hafidz Burhanuddin, A.P.	Petugas Ukur, Petugas entri data, petugas pemetaan persil	
4	Darmawan Adi Pradana, A.P.	Petugas Ukur, Petugas entri data, petugas pemetaan persil	
5	Gusti Ngurah Arya Triwijanto, A.P.	Petugas Ukur, Petugas entri data, petugas pemetaan persil	
6	Baskoro Edi Wicaksono, A.P.	Petugas Ukur, Petugas entri data, petugas pemetaan persil	
7	Firmansyah Setyawan, A.P.	Petugas Ukur, Petugas entri data, petugas pemetaan persil	
8	Asrul, S.H.	Kasubsi Penetapan Hak	

Dengan ini saya menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu pelaksanaan kegiatan aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Hendras Budi paningsat, S.ST. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan aksi peningkatan kualitas data pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Saya sepenuhnya memberikan dukungan terhadap aksi perubahan tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, serta dapat memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Diklat PKP) angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN melalui distance learning.

**LEMBAR PERNYATAAN DUKUNGAN**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Dari  
Alamat : Desa Lamong Jaya, Kecamatan Laeya  
Jabatan : Kepala Desa Lamong Jaya

Dengan ini saya menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Hendrius Budi peringkat, S.ST, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan aksi peningkatan kualitas data pertanian pada Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan. Saya sepenuhnya memberikan dukungan terhadap aksi perubahan tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, serta dapat memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (Diklat PEP) angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN melalui distance learning.

Andalo, 30 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Umar Dari

Dukungan dari Kepala  
Desa Lamong Jaya

Dukungan dari Kepala Desa Lapoa

**LEMBAR PERNYATAAN DUKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar  
Alamat : Desa Lapoa Kecamatan Tinangas  
Jabatan : Kepala Desa Lapoa

Dengan ini saya menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Hendrius Budi peringkat, S.ST, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan aksi peningkatan kualitas data pertanian pada Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan. Saya sepenuhnya memberikan dukungan terhadap aksi perubahan tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, serta dapat memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (Diklat PEP) angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN melalui distance learning.

Andalo, 30 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Iskandar

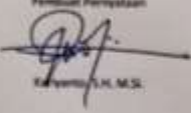
## Dukungan dari dinas transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan

**LEMBAR PERNYATAAN DUKUNGAN**

Fang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karyanto, S.H. M.Si.  
NIP : 20662209 1961023 1 004  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Transmigrasi

Dengan ini saya menyatakan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh saudara Hendras Budi Gannigkat, S.ST. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan aksi peningkatan kualitas data pertanian pada Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan. Saya sepenuhnya memberikan dukungan terhadap aksi perubahan tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, serta dapat memenuhi persyaratan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Kependidikan Pegawai (Diklat PNP) angkatan II pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/SPN melalui distance learning.

Anasuki, 29 Juni 2020  
Pembuat Pernyataan  
  
Karyanto, S.H. M.Si.